

## **Ekonomi, Sosial dan Politik**

Bangsa kita umumnya tidak berpelajaran sekolah, sedikit mendapat pelajaran sekolah yang amat tanggung-tanggung, sangat jauh daripada cukup, dapat sekedar menulis dan membaca, tetapi pendidikan akal dan kepandaian luput sama sekali. Yang cara kampung luput, yang cara baru tak dapat. Tambah sedikit pula bangsa kita yang mendapat pengajaran rendah setamatnya, dan yang sampai pengajaran tengah dan tinggi nyata tidak sampai memberi bekas jumlahnya. Dan yang sampai ke sana itu pun pengajaran tidak mebanyakkan apalagi mencukupkan pengetahuannya tentang orang-orang kita dan hal-hwal kita dan pergaulan kita di sini, melainkan yang dipelajarinya itu serba asing. Maka tidak heranlah, bahwa bangsa kita umumnya menjadi bangsa peniru yang tidak dapat memeriksa asal yang ditirunya, yaitu yang dikatakan dalam agama kita "peniru buta" (*muqallid a'ma*).

Adapun "peniru buta" sifatnya banyak keliru paham, sebab banyak yang ditiru tidak sampai dapat mafhumnya (pengertiannya), melainkan sekedar dapat "namanya", padahal tidak tegas pengertian tentang yang dinamai. Maka bangsa yang begitu biasanya hanya sedikit berbeda daripada bangsa burung beo, yang pandai juga menirukan beberapa perkataan, dan menguntukkan satu-satu perkataan untuk satu-satu benda, yang kebetulan saja baginya berhubungan dengan suatu perkataannya itu. Dan otak si beo tak mau mengerti bahwa satu-satu perkataan bermakna yang lebih luas.

Demikianlah umumnya bangsa kita amat sempit pengertiannya tentang makna tiga perkataan yang tertera di atas ini: ekonomi, sosial dan politik. Bagi tiap-tiap perkataan itu dipahamkan satu makna yang tertentu dan amat terbatas. Bukan saja dalam kalangan yang tidak atau yang kurang pelajaran dalam kaum pelajar dan terpelajar, yang masa ini umumnya mendapat gelaran intelektual hampir rata-rata bertemu kesempitan pengertian itu.

Misalnya 'ekonomi' dimaknakan urusan penghasilan harta kekayaan; maka membangun "bank", apalagi "bank kebangsaan," dianggap memajukan "ekonomi" kita, biar seribu kali "bank" itu hanya mengurus pencarian "dividen" alias "bagian keuntungan" belaka untuk sekutu-sekutunya yang punya sero.

Dan orang-orang yang menyebut "ekonomi kita" itu berhubung dengan sesuatu "perusahaan uang" (*financiele onderneming*) sedikit pun tidak memikirkan, bahwa misalnya "Nederlandsche Bank" tidak dirasakan sebagai "bank kebangsaan" oleh rakyat Belanda. Demikian juga "Bank of England" tidak menjadi "bank kebangsaan" untuk bangsa Inggris, dan "Banque de France" tidak menjadi "bank kebangsaan" bagi bangsa Prancis. Melainkan di dalam ke-tiga-tiganya negeri itu dirasakan oleh rakyat bank-bank itu sebagai "perusahaan kemodalan" yang sifatnya menarik harta daripada orang banyak yang kurang mampu dan menumpuk-numpukkan harta itu kepada golongan kaum modal, yang sedikit bilangannya.

Sebaliknya usaha dan aksi PSI akan mencegah pemberian tanah rakyat kepada *erfpacht* dan menuntut kembali tanah beribu-ribu *bau*, yang berharga berjuta-juta rupiah itu dan menjadi sumber rezeki dan pokok perniagaan rakyat umum, rupa-rupanya sedikit pun tidak dirasakan orang besarnya makna "ekonomi" usaha gerakan itu, yang sesungguhnya "ekonomi kita" itu, bahwa ini pun satu langkah.

Ekonomi yang amat besar maknanya bagi ekonomi kita, yang sesungguhnya. Maka sementara belum berhasil dengan perbuatan dan perusahaan yang sepadan adalah faedahnya sedikitnya memerdékakan pikiran dan cita-cita bangsa kita daripada kepercayaan, bahwa ekonomi kita mesti takluk dan bergantung kepada bangsa asing, khususnya bangsa pertuanan, yaitu Belanda. Padahal usaha ini, yang sekarang baru dapat dididik kemauan dan cita-citanya, ada dua tujuan yang mesti sama dapat, yaitu mendidik kekuatan ekonomi kita sendiri sambil menghapuskan kekuasaan kemodalan asing di dalam ekonomi kita itu.

Si penyebut "ekonomi kita" itu ada yang gembor-gembor membanggakan *nationaal vermogen* (kekayaan nasional), yang dapat dikumpulkan di dalam "bank kebangsaan". Tetapi rupanya mereka sedikit pun tidak mau memikirkan, bahwa PSI dalam membangunkan gerakan melawan *erfpacht* itu hendak memelihara *nationaal kapitaal*, pokok atau kebangsaan, yang sebetulnya tidak dapat dikira-kira besar harganya. Perlawanan riba pun daripada pihak PSI boleh dipikirkan besar maknanya bagi ekonomi kita oleh tiap-tiap orang yang mau berpikir dan mau mengerti. Sekalipun misalnya tidak mencegah si pemakan riba, akan tetapi perlawanan itu menambah-nambah besar permusuhan hati rakyat kepada perusahaan-perusahaan riba, seperti pegadaian dan tukang pencicilan. Dan permusuhan hati itu menjadi dasar yang subur untuk mengikhtikarkan pembangunan perusahaan-perusahaan sendiri yang perlu untuk menghapuskan perusahaan-perusahaan itu.

Sekianlah keterangan kita tentang pahan dan tujuan ekonomi yang lebih luas daripada paham yang *cupet* daripada "peniru buta" itu.

Tentang maftumnya "sosial" tidak pula lebih luas pengertian umumnya kaum "peniru buta" itu. Usaha sosial diambil dengan makna yang *cupet*, yaitu menolong kesengsaraan dan usahanya ialah "rumah sakit" penolak penyakit, rumah miskin dan rumah yatim penolong kemiskinan dan sekolah penolak kebodohan.

Maka suatu perserikatan, yang mengusahan tiga-cempat macam itu mendapat nama perserikatan sosial yang seolah-olah berkumpul didalamnya segala pokok-pokok usaha sosial.

Padahal pokok-pokok yang diusahan itu hanya bagian-bagian yang amat kluang sekali pentingnya, khususnya di dalam pergaulan hidup, jajahan, yang terdapat di dalam tanah air kita ini.

Maka tidaklah mereka mengerti besar makna kesosialannya, gerakan yang diusahakan PSI bagi mengatur zakat, bagi memperbaiki aturan perkawinan, bagi membangunkan pengajaran sendiri, yang tetap berdasar kepada agama bagi menjauhi pergaulan hidup campuran antara bangsa yang berlainan hak dan hukum, membagi manusia dalam golongan-golongan bertinggi berendah, karena kebangsaan atau karena golongan. Tidak mengertinya mereka itu disebabkan oleh tidak memahami makna "sosial" itu dengan makna "perbaikan" yakni "ikhlas" pergaulan hidup dengan seluas-luasnya dan memerangi segala penyakit pergaulan itu. Maka baik perbaikan, maupun peperangan itu hendaklah dilakukan mulai dari urat dan akarnya dari pendirian rumah tangga dan dari pendidikan anak.

Syndan pekerjaan tambah-tambah borok yang dilakukan oleh perserikatan "sosial" seperti yang tersebut tadi itu adalah pengaruhnya sekedar mengautkan keadaan yang berdiri di atas dasar sosial yang rusak di dalam tanah jajahan ini.

Tidak pula kita hendak melanjutkan panjang-panjang keterangan ini. Sekedar yang sudah kita sajikan itu cukuplah akan menjadi tangga bagi ahli pikiran akan meneruskan pikirannya atas pasal ini.

Maka sampailah kita kepada politik.

Adapun bagi "peniru buta" adalah politik itu semata-mata mencampuri urusan pemerintah dan perlawanan kepada pihak kekuasaan. Dan lanjutnya pahan yang keliru itu ialah, bahwa sesuatu partai politik hanyalah semata-mata mengusahakan pergerakan terhadap kepada pemerintah dan kekuasaan di dalam negeri dengan tujuan berebut kekuasaan. Maka ditambah lagi, paham "buta-tuli" itu dengan pendapat, bahwa kalau belum ada kekuatan lebih baik jangan dirembug urusan itu. Baiklah mengurus "ekonomi" saja dulu, atau "sosial" saja dulu.

Mereka lupa, bahwa di dalam tanah jajahan ini dalam "ekonomi" dan dalam "sosial" telah tumbuh satu keadaan, yang berdasar kuat di atasnya "kemenangan pertuanan" (*Nederlands*

*overwicht*). Maka tiap-tiap pembangunan usaha "ekonomi" atau "sosial" tiru-tiruan meniru contoh yang ada, sekalipun dengan maksud persaingan (konkurensi) adalah ia menguatkan barisan ekonomi dan sosial, yang bersojutuan dengan keadaan tadi itu.

Demikianlah persaingan anantara *zending* Protestan dan misi katolik dan propaganda teosof menambah kuat berdirinya kolonialisme di sini. Maka tak dapat tidak suatu perserikatan yang memasuki sosial yang berpadanan dengan kolonialisme itu juga.

Demikian pula persaningan antarpelbagai bank dan perusahaan besar-besar daripada kemedalan Belanda menguatkan keadaan ekonomi yang menjadi dasar kolonialisme sekarang ini. Maka terpaksa pula tiap-tiap persaingan yang dibangun dengan nama kebangsaan masuk ke dalam lingkungan itu mesti menjadi tambahan kekuatan keadaan itu juga.

Syahdan hal "kemenagan Belanda" (*Nederlands overwict*) itu bersandar kepada hukum (*wet*) yang berlaku dan politik kekuasaan yang terpakai di dalam jajahan ini. Sebab itu tiap-tiap gerakan atau usaha yang hendak mengenal "kemenagan" itu dengan maksud menghapuskan dia dengan persaingan, yang akan menjadi kekuatan "ekonomi" atau "sosial" kita belaka, mesti kerap kali mendapat halangan daripada hukum itu dan terlebih lagi daripada politik kekuasaan.

Oleh sebab itu maka usaha "sosial" dan ekonomi kebangsaan belaka, yang tidak hendak menjadi perkakas pihak asing di sini, terpaksa mesti berlaku dengan politik.

Adapun keterangan kita ini mesti ternyata benar dan terangnya kepada tiap-tiap pihak, yang mau berpikir dan pandai serta tega menolak godaan perdayaan dunia, yaitu seperti keuntungan atau kesenangan yang dekat, alias lekas ada buktinya. Dan daripada keterangan itu teranglah bahwa terutama dalam keadaan tanah jajahan tidak berpisah ekonomi, sosial dan politik.

Maka bagi tiap-tiap orang Islam di dalam jajahannya ini didapatiyalah kumpulan yang tiga itu di dalam Partai Sarekat Islam. Sebab memang agama Islam, yang menjadi asas partai itu, ada membawa asas-asas aturan dan perbaikan atas segala medan kehidupan, ekonomi, sosial dan politik dan lain-lain lagi yang tercampur dalam kehidupan manusia.

... dan sebagainya...

**Rasa Kebangsaan dan Asas Ekonomi**

Di dalam peralatan PI yang sudah terdahulu beritanya dalam *Fadjar Asia*, Tuan Djaksodipuro ada mengucapakan bacaan atas pasal yang kita jadikan kepala berita ini.

Pada permulaan bacaan itu kita dengan pemandangan tentang dasarnya pergerakan bangsa di atas kebangsaan. Dengan memperhatikan karangan Prof. Treub "Het gist in Indie" ('Hindia

sedang naik radang'), pembaca itu berkata, "Memang sesungguhnya Indonesia sedang naik radangnya, dan memang hal itu akan terus-menerus berlaku demikian selama kerajaan" (*staat*) dan bangsa (*natie*) tidak menjadi sebangsa. Dan pula terjadi di Indonesia saja kita bertemu hal yang demikian itu, melainkan itu mesti terdapat di dalam tiap-tiap negeri yang kekuasaan negeri tidak terpegang oleh bangsa yang bernegeri itu. Ada juga orang-orang yang sontok pikiran dan terutama orang-orang yang kepentingan dalam keadaan yang berlawanan dengan semestinya itu, yang orang-orang itu menganggap durhaka akan

pergerakan bangsa itu, akan tetapi pada hakikatnya pergerakan itu tidak berbeda sifatnya dengan barang yang terpuji dalam seluruh dunia, khususnya dalam negeri-negeri merdeka, yaitu 'asas kebangsaan' (*nationalisme*) dan adalah pergerakan bangsa itu satu tanda hayat

yang sehat daripada asa itu." Lalu pembaca menerangkan bahwa lambat laun telah sampai masanya, bahwa rata-rata orang Belanda yang terkemuka telah mengakui patutnya cita-cita kita yang berdasar kebangsaan.

Adapun asas kebangsaan yang sehat menuju diri sendiri, demikianlah kata pembaca, jadi sifatnya memperbaiki sifatnya keluar hanya sekedar bertahan membela diri. Maka tidaklah

ada kebencian atau sakit hati pada asalnya, melainkan terbitnya semata-mata daripada cinta yang sangat kepada bangsa dan tanah air.

Banyak orang keliru sangka, sebab sudah bisa memaknakan haluan kebangsaan (nationalisme) itu dengan maknanya di dunia Barat, yang bersifat mendorong dan menyerang keluar. Padahal "nationalisme" macam itu yang masih amat disukai orang dalam Parlemen (Lagerhuis) Inggris, sesungguhnya tak lain, tak bukan, melainkan imperialisme belaka.

Setelah memperingati pengakuan haluan kebangsaan itu sebagai barang yang halal dan patut, pembaca hendak menyelidiki apakah pengakuan itu disertai sikap dan kelakuan yang berpadanan dengan pengakuan itu. Rupa-rupanya masih banyak tidaknya daripada yang dikatakan, dan diperingatinya beberapa kejadian yang terjadi atas kongres pemuda baru-baru ini. (Banyak larangan berhubung dengan pergerakan pandu, sampai larangan menyebutkan perkataan "merdeka", larangan nyanyian Indonesia Raya, pendeknya kesempitan sikap polisi terhadap kepada hak bersuara.

Pembicara memperingatkan pula pertunjukkan dalam Gedung Kesenia (schouwburg) pada tutup tahun, yang melukai perasaan kebangsaan anak Indonesia dan memprogandakan kekuasaan pertuanan pada pihak Belanda. Sampai kini pemerintah tidak menyalahkan perbuatan dari pegawai kekuasaan dan daripada Kongres Belanda itu. Sikap pemerintah yang membiarkan saja perasaan kebangsaan rakyat jajahan ini kena bencana tidak memudahkan urusan jajahan ini padahal segala pihak mesti ingin melihat selesainya urusan itu dengan aman dan damai.

Politik asosiasi terpaksa mesti kecewa, sebab orang hanya menghendaki jadinya asosiasi (alias campuran itu) tetapi jalan akan mencapainya tidak dipentingkan. Betul sekali asosiasi itu mesti berhasil pada akhirnya.



Memang manusia tidak dijadikan untuk perceraian, melainkan untuk bercampur-gaul. Hanyalah syarat campuran itu haruslah kedua belah pihak ada untungnya.

Paham demokrasi pun tidak boleh menyetujui pemerintahan kebangsaan asing. (Maka demokrasi dan keparlementeran dipuji orang setinggi langit di nederland. Paham itu mesti menghabiskan urusan jajahan pada akhirnya, sebab mustahil amat Nederland, yang meninggalkan derajat demokrasi di negeri sendiri, akan membenarkan autokrasi atau fasisme dalam jajahan.

Sementara menantikan hilangnya keadaan jajahan, haruslah pemerintah seakan-akan pemerintahan kebangsaan (*nationale regering*) sendiri. Dari hal *Poenale sanctie* pemerintah jauh sekali daripada kelakuan itu. Pemerintahan ini bangsa sendiri niscaya tidak akan menghidupi *Poenale sanctie* itu sehari pun jua.

Kata orang *Poenale sanctie* itu perlu, sebab Indonesia adalah negeri penerbit hasilnya itu keperluan dunia segenapnya. Tetapi untuk mendapatkan hasil itu dilakukan orang politik yang mengeringkan negeri ini (*drainagepolitiek*). Itulah yang tidak dapat dibenarkan. Betul Indonesia perlu dikerjakan dengan modal asing yang tentu saja menghendaki rentenya dan juga upah pengusaha (*ondernemersloon*); tetapi sebaliknya mesti ada pula rente bumi dan upah pekerja (buruhan) yang patut. Tetapi upah itu sekarang ini untuk lelaki rata-rata 46 sen sehari dan disebutkan oleh pembaca sikap kaum buruh Polandia. Mereka mengakui bahwa sosialisme mementingkan kaum buruh, tetapi kata seorang pemuka mereka daripada sosialisme itu. Demikianlah terbukti bahwa dalam suatu bangsa yang mempunyai pemerintah sendiri adalah kehendak ekonomi dikalahkan perasaan kebangsaan.

Syhadan ekonomi yang bersifat nasional mesti menuju kepada otarki yaitu mengadakan keperluan sendiri lebih dahulu daripada mementingkan penghasilan (untuk keperluan) perniagaan dunia.



Betul kalau mengingat ekonomi besar faedahnya bertukar-tukaran hasil dengan negeri lain-lain, sebab dengan jalan itu tiap-tiap negeri boleh mementingkan yang terlebih murah ongkosnya di negeri itu. Tetapi dalam menimbang faedah itu tak boleh dilupakan, bahwa keperluan nasional mesti diurus lebih dahulu. Maka salah satu keperluan nasional itu ialah, bahwa si pekerja mendapat kehidupan yang patut dan berpadanan dengan kemanusiaan. Maka jika pemerintah mengingat beberapa hal itu niscaya dapatlah disingkirkan beberapa kenistaan pemerintah kebagaan asing:

Sekian isi pidato itu yang kita ringkaskan sekilas. Kita tidak hendak memanjangkan pandangan atas pemandangan itu. Hanyalah hendak kita peringatkan, bahwa ia memajukan beberapa kehendak tentang perubahan sikap pemerintah pertuanan atau bangsa, yang berhubungan dengan sifat pemerintah dan bangsa itu. Maka sifat itu bukan sebagai niat, yang dapat diubah atau ditukar-tukar. Melainkan sikap yang terbit daripada sifat itu hanyalah akan berubah, jika berhadapan dengan sikap-sikap rakyat Indonesia ini, yang memaksa perubahan itu. Maka kemajuan bangsa kita Indonesia, malah asosiasi pun antara dua bangsa, yang bernegeri di sini, hanyalah dapat dihasilkan dalam pertentangan (*strijd*) yang akan mengubah duduknya kekuatan (*machtsverhoudingen*).

Syahdan untuk membangunkan dan menyusun kekuatan pihak rakyat itu tidak ada jalan yang lain lagi, melainkan jalan "menyendiri" dan menyusun diri bagi mendidik kekuatan sendiri lepas daripada pengaruh pihak pertukaran. Itulah politik yang dijalankan oleh PSI.

Pada jalan ini yang oleh menyendirinya itu tidak mendapat sokongan atau bantuan dalam keadaan yang sekarang ini tentulah tidak lekas terdapat "bukti" yang memberi bekas keluar. Tetapi nyatalah, bahwa jalan PSI itulah yang dapat dikuatkan sifat-sifat yang menimbulkan kekuatan lahir dan batin yang perlu-perlu dalam pertentangan yang tersebut tadi.

Banyak orang hendak memungkir kenyataan itu. Banyak orang menuduh-nuduh, bahwa pergerakan SI tidak ada hasilnya melainkan omong kosong belaka. Tetapi orang-orang itu sendiri pada hakikatnya sadar juga akan kebohongan pendakwaannya.

Malah kita berani menegaskan, bahwa segala golongan di tanah air kita ini baik bangsa asing, maupun bangsa sendiri, baik kaum p-e-b matang maupun kaum pergerakan kemerdekaan, yang "evolusioner" atau "revolusioner" sekalianya sadar akan besarnya kepentingan pergerakan PSI. Dan semuanya sadar pula bahwa PSI sesungguhnya membangun menyusun dan menggunakan segala kekuatan rakyat lahir dan batin untuk mengangkat derajat untuk mengangkat derajat bangsa kita segenapnya yaitu segala golongannya, dan bukan kaum PSI saja, serta menuju jalan kemerdekaan rakyat bangsa kita daripada segala macam tindasan dan perhambaan.

Inilah sebabnya PSI sangat banyak reaksi yang menghalang-halangi perjalanannya. Dan halangan dan rintangan itu pulalah, yang menjaga kesucian PSI dan mempercepat kuatnya.

*Harian Fajar Asia*, 13, 15 Februari 1929

**Haji Agus Salim Berbahaya?**

Tatkala di negeri Belanda saya telah dapat berhubungan bagi keperluan pergerakan kaum buruh dan politik bangsa kita di sini. Bagi pergerakan kaum buruh saya mendapat perjanjian daripada *bestuur Nederlands Vak verbond* (NVV) bahwa organisasi kaum buruh Nederland yang terhimpun di dalamnya beberapa *vakvereniging* dengan jumlah anggota 240.000 orang, bahwa mereka suka dan sedia menyokong dan membantu

pergerakan kaum buruh di sini, bagi menolong membangunkan yang belum ada dan menguatkan yang sudah ada. Daripada *Partij Sociaal-Democrata* (SDAP) yang dalam pemilihan *lid Tweede Kamer* mendapat suara 800.000 lebih daripada jumlah pemilih Belanda yang 3.000.000 lebih daripada *partij* itu yang diikuti politiknya oleh hampir seperempat penduduk Nederland, sehingga mendapat *lid* 24 orang dalam parlemen Nederland, saya telah mendapat pengakuan akan haknya bangsa Indonesia atas kemerdekaan di tanah air sendiri dan saya mendapat perjanjian *partij* itu bahwa mereka akan menyokong pergerakan bangsa kita menuju kemerdekaan seperti yang tersebut itu.

Sudah tentu kesanggupan dua pihak tadi mengandung syarat, bahwa pergerakan yang akan disokongnya atau dibantunya itu tidak boleh berlawanan asas dan lengkap perlawanan daripada yang dipakai mereka sendiri. Artinya terutama sekali dua pihak itu dalam pergerakan buruh dan dalam pergerakan politik sangat menolak asas-asas dan cara-cara pergerakan komunis atau *bolsyevik* yang bersandar kepada Moskow.

Bagi saya, yang memang sebagai ketetapan pergerakan Partai Sarekat Islam tidak mencocoki atas dan peraturan pergerakan Moskow, tentulah syarat itu tidak menjadi keberatan.

Syahkan tatkala saya berangkat dari Nederland adalah saya memperingati kesanggupan dua badan pergerakan kaum buruh Nederland itu dalam sebuah karangan yang saya kirimkan kepada majalah *De Strijd*, yaitu organ NVV yang dibaca oleh sekalian anggotanya yang 240.000 orang itu. Dalam karangan itu saya menyatakan kepentingan bagi pergerakan kita di sini, bahwa langkah-langkah kita ketahu dan dihargai oleh kaum buruh berorganisasi modern di Nederland itu. Tidak cukup kepada kita kesanggupan pimpinan-pimpinan pergerakan di sana itu, melainkan sangat perlu kepada kita perhatian dan perasaan kaum buruh yang beratus ribu itu. Saya menyatakan percaya bahwa badan-badan pergerakan kaum buruh di Nederland hanyalah bisa mementingkan perkara-perkara itu ada pula berarti dalam perlawanan pergerakan kaum buruh di Nederland dalam ekonomi dan politik terhadap kepada musuhnya, yaitu kaum kapitalis dan imperialis di Nederland dan dalam

dunia umumnya. Jika bertambah sempurna pengetahuan kaum buruh di Nederland tentang perihwal kita di sini, saya menyatakan kepercayaan bahwa miscaya bertambah-tambah jelas kaum buruh Nederland itu akan sadar, bahwa keadaan jajahan ini di bawah kekuasaan dan dalam tanggungan Nederland, sesungguhnya hanyalah menjadi keuntungan sejumlah yang amat kecil kaum kapitalis dan borjuis Nederland, yaitu kaum hartawan dan kaum pangkat. Tetapi bagi kaum buruh Nederland hal itu tidak menjadi keuntungan malah sebaliknya. Kaum hartawan dan kaum pangkat itu oleh adanya koloni ini, tidak butuh memajukan kerajinan dan perusahaan tanah di negerinya dengan semestinya, sebab bagi hartanya dan bagi pangkatnya cukuplah mereka mengeluarkan kapitalisme perniagaan (bank-bank), kapitalisme pelayaran, dan kapitalisme perusahaan tanah dan tambang galian dalam jajahan. Betul dalam keadaan sekarang ini sebagian besar penghasilan yang menjadi rezeki segenap bangsa Nederland, dengan kaum buruhnya pun juga, bergantung kepada keadaan koloni ini, tetapi oleh karena keadaan ekonomi di Nederland sendiri tidak menjadi kepentingan bagi perusahaan kaum hartawan dan kaum pangkat itu, kita lihatlah bahwa kaum buruh Nederland tidak lebih baik kedudukannya dan pencahariannya daripada kaum buruh misalnya di Swedia, Norwegia dan Denmark, yang tidak mempunyai jajahan. Berpuluh ribu juga kaum proletar Nederland yang hidup melarat tidak mendapat pekerjaan. Sebaliknya kaum hartawan dan kaum pangkat yang menjadi musuh kaum buruh Nederland, baik di medan ekonomi maupun di medan politik. Dan inilah sebabnya, maka di Nederland, yang sudah tua demokrasinya, tetap saja kekuasaan terpegang oleh konservatisme dan reaksi kaum hartawan dan kaum pangkat itu.

Beginilah kira-kira pemandangan yang saya uraikan di dalam organ kaum buruh di Nederland itu, yang pemandangan itu boleh diuji dengan kenyataan keadaan dengan tidak dapat dibantah lagi. Pemandangan semacam itu, untuk pertama kali tentu tidak akan termakan betul-betul ke dalam akal dan pikiran kaum buruh Nederland, yang sudah 300 tahun dikelabui matanya oleh kaum hartawan dan kaum pangkat bangsanya sendiri. Akan tetapi oleh pihak kaum hartawan dan kaum pangkat itu segeralah dirasakan sebagai "bahaya" yang amat mengancam. Kaum hartawan dan kaum pangkat itu sadar dengan sejelas-jelasnya, bahwa jika sungguh-sungguh terbuka mata kaum buruh Nederland bagi

kenyataan keadaan yang sesungguhnya itu, niscaya berbaliklah kaum buruh Nederland menolak, menyangkal dan akhirnya memberantas eksploitasi jajahan ini, yang melanggar asas pergerakan kaum buruh dan merusak nasib dan pendirian kaum buruh dengan segala tenaganya, yang begitu bagus organisasinya.

Tidak heran bahwa suara kaum hartawan dan kaum pangkat bangsa Belanda di sini, surat kabar *Soerabaias Handelsblad* terkejut dengan laku tidak beda dengan kelakuan penipu yang dibukakan orang guci wasiatnya. Ia mengeluarkan bantahan. Tetapi seperti juga kelakuan penipu yang kedapatan, ia tidak membantah kenyataan yang tidak dapat dibantahnya. Nasibnya baik. Ia tahu, bahwa kewajiban yang pertama dan yang terutama bagi pemerintah Nederland di sini, yang mendapat jajahan ini sebagai pusaka warisan daripada kongsi perniagaan hasil negeri ini, tidak lain dan tidak bukan, melainkan menjaga kesejahteraan perusahaan dan perniagaan itu, yang di bawah bendera kerajaan dilanjutkan oleh modal swasta Nederland. Dengan pengetahuan itu dapat ia mengelirukan pandangan atas keadaan pertentangan kita kaum pergerakan, yang hendak merebut kembali hak dan kehidupan kita di medan pencaharian rezeki di tanah air kita ini, yang kita ditakdirkan Allah tidak mempunyai tanah air lain, dikelirukannya pergerakan perlawanan hendak merobohkan kekuasaan Nederland atas jajahan ini.

"Berbahaya," kata *Soerabaias Handelsblad*. "Semua kaum politik *Inlander*, yang sesungguhnya tidak harus dikasih nama kaum politik, semuanya itu tidak ada asas lain daripada benci Belanda. Haji A. Salim, pun katanya, yang sangat sukar diketahui hakikat kemauannya, dan yang barangkali memang ada punya tujuan yang lebih tinggi sedikit dari lain-lain konco-konco kaum politik, tidak juga jauh maksudnya melainkan lepas dari Belanda. Dan ini Haji, yang menggunkan juga pengaruh kehajiannya lebih lagi berbahayanya, sebab sudah matang sekolahan politiknya sekarang ini ditambahnya pula tajamnya oleh tambahan pendapat dalam perjalanannya di Belanda. Ia telah dapat menghubungkan diri dengan pergerakan kaum buruh di Belanda di medan *vakbeweging* dan medan politik.

Maka sekarang dialah yang akan memberi pencerangan kepada golongan kaum buruh Belanda itu? ...  
Beginilah kira-kira kritik *Soerabaias Handelsblad* tadi, yang memang sepadan dengan derajatnya. Orang yang ikhlas memang hanya dapat dihargai oleh orang yang ikhlas pula. Orang yang curang tidak pandai menghargai keikhlasan orang lain. Sebab itu kita tidak heran, kalau *Soerabaias Handelsblad* tidak pandai menghargai keikhlasan pergerakan kita. Lepas dari Belanda, menjadi bangsa merdeka, berpemerintah sendiri di negeri sendiri.  
Tinggal lagi pertanyaan, apakah pemerintah Belanda yang sekarang ini menjadi wakil kaum hartawan dan kaum pangkat, yang hendak memaksa mengekalkan kekuasaannya dengan tidak memandang kesukuan bangsa Indonesia yang memptiyaki tanah air ini? Ataukah pemerintah Belanda itu satu pemerintah yang sopan, yang menglasai jajahan ini menurut paham kesopanian zaman sekarang ini, yaitu dengan menanggung wajib akan membukakan jalan kepada bangsa ini bagi mencerdaskan diri pada jalan yang dikehendaki sendiri, sehingga akhirnya akan menguasai negeri yang merdeka?  
Bisa jadi hawa dan nafsu serta keperluan diri (*eigenbelang*) golongan kaum hartawan dan kaum pangkat menghendaki seperti yang terkandung dalam pertanyaan yang pertama itu. Akan tetapi zaman dan kehormatan manusia serta asas yang sudah diakui oleh segala bangsa sopan di muka bumi, tidak mengindahkan kecuali paham yang terkandung dalam pertanyaan yang kedua itu.  
Nyatalah *Soerabaias Handelsblad* menjadi wakil satu kaum yang sudah lewat temponya. Dan dengan tenang hati dan pikiran kita menantikan zaman yang akan datang, yang mesti membenarkan dan membuktikan sikap dan tujuan kita.  
Kepada penulis *Soerabaias Handelsblad* dan kaumnya, kita ucapkan: "Selamat tinggal dalam kekunoanmu!"

Harian *Fadjar Asta*, 20 Februari 1930

**Poenale Sanctie Dihapuskan**

Pembaca yang memperhatikan warta dunia dalam *Moestika* ini tentulah telah mendapat pemandangan jelas atas peperangan cukai. Tiap-tiap negeri memasang "pagar cukai" (*tariefmuur*) dan lain-lain peraturan untuk melindungi perusahaan dan kerajinan dalam negeri sendiri-sendiri daripada persaningan barang luaran yang datang dan hendak diperniagakan orang dengan harga murah.

Terutama sekali sekarang ini sangat ramai berita perang cukai itu, oleh karena Inggris, yang lama sekali mempertahankan asas perniagaan bebas (*vrijhandel*) telah membangun pula pagar cukai dan dengan amat kerasnya.

Tetapi sesungguhnya perang cukai dan pemagaran negeri itu bukan perkara baru. Malah dalam beberapa persidangan majelis perniagaan (*International Congres Kamers van Koophandel*) beberapa bulan yang lalu di Amerika dan permusyawaratan urusan uang berhubung dengan hutang-hutang perang dan pembayaran kerugian perang (*rencana Dawes*) di Inggris (*Chequers*), Paris dan Berlin sudah berulang-ulang diperbincangkan perkara pagar-pagar cukai itu, yang mengekalkan dan mengeraskan krisis ekonomi. Dalam pertengahan bulan Juni yang lalu ramai pers di sini dan di Belanda memperbincangkan satu peraturan yang diadakan juga. Waktu itu Amerika menetapkan *wet* yang melarang masuk Amerika Serikat barang-barang yang dihasilkan dengan menggunakan kerja paksaan (*gedwongen arbeid*).



Adapun yang terutama sekali dituju atau yang terutama sekali kena oleh aturan itu, ialah tembakau dari Deli, karena kerja kuli dengan kontrak ber-poenale sanctie dianggap kerja paksa juga oleh wet Amerika Serikat itu.

Ribut dunia uang dan ribut pula pers di Belanda dan di Indonesia karena peraturan Amerika yang akan membencanai perniagaan Belanda dan jajahannya. Macam-macam suara yang tajam dan yang pahit dan yang masam ketika itu tersiar dalam pers, mencaci dan menuduh Amerika Serikat. Membukakan rahasianya, bahwa perbuatannya itu bukan kewanusiaan, melainkan karena politik penjaga kantong belaka. Untuk menjaga kantong orang-orang yang mengusahakan tanaman tembakau di Amerika sendiri. Terlebih sekali sakit hati pihak kaum majikan Belanda itu, karena kebetulan berhubung dengan pembicaraan dalam Permusyawaratan Perburuhan Internasional di Jenewa dalam tahun 1929 dan 1930, pihak majikan di Sumatra Timur itu sedang membangunkan buat menentang dan melawan tuntutan pihak kaum pekerja dalam konperensi Jenewa itu dianggap menjadi pekerjaan kuli kontrak itu sebagai kerja paksaan dan supaya dengan segera dihapuskan.

Perlawanan mereka sudah agak berhasil. Kerja kontrak ber-poenale sanctie tidak jadi dimasukkan agenda bersama dengan kerja paksaan lain-lain, istimewa kerja rodi (herendienst). Dan pembicaraan atas perkara itu diundurkan dengan tidak ditentukan tahun mana ia akan dibicarakan.

Tidak heran, bahwa amat sakit hati kaum majikan itu tatkala datang keputusan Amerika itu yang dari bermula sudah kelihatan akan memaksa kaum perusahaan tembakau di Deli itu akan menghapuskan kontrak ber-poenale sanctie dari perusahaan mereka.

Dan apabila sudah terpaksa hilang kontrak ber-poenale sanctie dari satu bagian perusahaan onderneming, yang amat besar dan penting itu, niscaya tidak akan dapat lagi mereka mempertahankan keperluan kontrak semacam itu untuk pekerjaan lain-lain. Maka

terbuanglah, segala pekerjaan komisi mereka yang sudah menyediakan alasan-alasan setimbun besar untuk digunakan mempertahankan *poenale sanctie* dalam permusyawaratan internasional itu, bilamana terjadi.

Tetapi bagaimanapun kesakitan hati, paksaan kantong menyuruh menerima paksaan. Pasar tembakau bertambah kendor, harga tembakau bertambah jatuh. Jika tertutup pula kelak pasar di Amerika itu untuk tembakau Deli, niscayalah terpaksa jatuh. Maka berhadapan dengan paksaan kantong itu, paksaan yang sangat dijunjung tinggi oleh umumnya kaum majikan dunia kemodalan, tidak ada lain lagi yang dapat diperbuat, melainkan peraturan kontrak ber-*poenale sanctie*, yang hendak dipertahankan dalam permusyawaratan internasional itu, tiba-tiba terpaksa dihapuskan sendiri tidak menanti-nantikan keputusan permusyawaratan internasional itu lagi.

Dengan tiba-tiba dan dengan sekaligus perusahaan tembakau di Deli menghapuskan peraturan kontrak ber-*poenale sanctie*. Tidak dengan berangsur-angsur, tidak hanya buat kuli baru yang akan diterima atau kuli lama yang sudah habis kontrak, melainkan rata-rata untuk segala kuli yang lagi bekerja dan yang didatangkan.

Dalam perusahaan tembakau Sumatra Timur, *poenale sanctie* tidak ada lagi. Hilang lenyap segala timbangan dan alasan yang sudah-sudah. Penghapusan tidak ditangguhkan lagi, sehari tidak, semalam pun tidak.

Tidakkah perubahan yang dengan tiba-tiba itu menimbulkan kekusutan dalam urusan dengan kuli-kuli yang masih dalam pekerjaan dengan *poenale sanctie* itu?

Hal ini akan kita beri pemandangan dalam bagian berikut.

**Penutup**

Dalam bagian pertama sudah kita beritakan keputusan penghapusan kontrak ber-*poenale sanctie* bagi perusahaan tembakau di Deli. Tegaknya mulai 1 Januari 1932 segala kontrak dengan *poenale sanctie* dalam perusahaan itu dihapuskan. Dan terang pula, bahwa penghapusan itu terpaksa, karena mulai tahun 1932 *wet* Amerika Serikat atas barang masuk ke negeri itu tidak mengizinkan kedatangan barang atau hasil yang dikerjakan dengan kerja paksa. Berhubung dengan itu tuan J.E. Stokvis telah menulis dalam surat kabar *Het Volk* (Belanda), *Het is triestig om te moeten vaststellen, maar de Amerikaansche regering weet op Deli vruchtbarder bewind te voeren dan de Indische.*

Artinya, "Sungguh kecewa hati karena terpaksa mesti mengakui, bahwa pemerintah Amerika ternyata lebih pandai melakukan kebijakan yang lebih berhasil di Deli itu daripada pemerintah Hindia sendiri."

Syahdan lenyapnya *poenale sanctie* dalam sebagian perusahaan di Deli itu, terutama di dalam masa ini, yang ternyata beberapa banyak perusahaan berkhiat hendak menurunkan bayaran pekerjanya dan hendak mengurangkan jumlah pekerja itu, ada terkandung di dalamnya bahaya atas kaum pekerja itu.

Selama ini kontrak ber-*poenale sanctie* itu hanyalah menjadi keuntungan kaum majikan. Kuli yang terjat dalam kontrak ber-*poenale sanctie* itu, tak dapat melepaskan diri, apabila dikehendaknya lepas itu. Berlainan dengan kontrak perjanjian sipil umumnya, si pekerja terikat itu tidak dapat menembus dirinya.

Sekalipun ia suka misalnya memulangkan *voorschot* yang diterimanya, sekalipun misalnya ia suka membayar kerugian sekedarnya, untuk pengganti belanja penggantinya, tidaklah ada kelapangan baginya akan melepaskan diri. Dan tiap-tiap pelanggaran si pekerja akan kontrak itu, seperti misalnya tak mau bekerja atau kurang rajin bekerja atau tidak meyudahkan bagian yang diwajibkan oleh pihak majikan, tiap-tiap pelanggaran itu, berlainan dengan tiap-tiap perjanjian sipil yang lain, tidak menjadi urusan polisi dan

15

dihukum oleh hakim "rol" dengan hukuman badan (penjara). Dan waktu yang dalam hukuman itu tidak terhitung waktu perikatan kontrak.

Adapun akan ketentuan, bahwa kontrak itu boleh diputuskan sebelum habis masanya dengan semufakat dua pihak, atau dengan kehendak sebelah pihak majikan saja dalam satu-satu hal, tidak ada pentingnya dalam waktu pekerjaan dan pasar ramai. Dalam masa itu jangankan majikan hendak memutuskan kontrak sebelum habis masanya, malah ia selalu berdaya-upaya akan mengikat kembali pekerjaanya dengan kontrak baru, sehabis kontrak lama. Daripada daya upaya terkenal misalnya permisi main di kebon-kebon, yang menghabiskan uang si pekerja dan membanyakkan hutangnya, sehingga di waktu habis kontraknya ia terpaksa membarui kontrak.

Tetapi sekaranag keadaan amat berlainan, sebagaimana sudah tersebut tadi. Topan penghematan meniup dengan hebatnya dalam dunia perusahaan kemodalan. Bayaran diturunkan dan beribu-ribu kaum pekerja dikirim pulang. Tidakkah penghapusan kontrak ber-*poenale sanctie* itu akan menjadi satu alasan nanti kepada majikan-majikan di Deli itu akan mengobrol kulinya, mengirimkan mereka ke desa-desa di Pulau Jawa ini, yang di sini pun pasar pekerjaan sudah sesempit-sempitnya dan medan penghasilan tidak lagi memberi makan?

Inilah timbangan yang menimbulkan was-was dalam hati beberapa orang dan yang menyebabkan Tuan De Dreu (ISDP) bertanya dalam *Volksraad*, yang maksudnya meminta, supaya pemerintah menjaga, janganlah sampai *poenale sanctie* itu dijadikan sebab bencana yang besar pula dalam waktu ini atas kaum kuli.

Jawab pemerintah sudah datang. Kuasa pemerintah telah menyatakan bahwa pencabutan *poenale sanctie* itu tidak akan menjadi sebab lepasan orang yang berlebihan dan kiriman mereka pulang ke desa. Lain daripada itu ada pula keterangan, bahwa pemerintah memang berjaga-jaga untuk mengikhtiarkan penolakan bencana pengangguran dalam desa-desa.

Tetapi sebaliknya ruangan surat kabar kita ini selalu memuat berita pengiriman kuli pulang dari Deli itu dan kemelatan orang yang dikirim pulang itu.

Salahkah jawab pemerintah itu? Pada pengetahuan kita tidak. Memang kuli yang beratus-ratus tiap minggu dikirim pulang itu, menambah sempit pasar pekerjaan, menambah sengsara kehidupan desa, bukanlah kuli lepasan yang daripada pencabutan kontrak dengan *poenale sanctie*. Yang berkontrak pun boleh dikirimkan pulang, sebagaimana sudah kita terangkan tadi. Kekuatan kontrak itu hanyalah bagian pihak majikan. Tak ada perindungannya untuk pihak pekerja.

Sebab itu penghapusan kontrak ber-*poenale sanctie* dalam perusahaan tembakau itu haruslah kita sambut dengan syukur, karena menghapuskan sebagian penghinaan yang dipikulkan atas rakyat sebangsa kita. Dan tidak lain harapan kita, melainkan supaya kelaklah berikut pula penghapusan kontrak ber-*poenale sanctie* itu daripada segala perusahaan *onderneming* dalam seluruh Indonesia, di mana masih ada kontrak itu berlaku.

Harian *Moesjika*, 30 November, 1 Desember 1931.